



Dana Kelurahan Menunggu Perwal

YOGYA (KR) - Dana kelurahan tahap I (50%) dari pemerintah pusat akan segera dicairkan paling lambat Mei 2019. Nantinya, dalam pemanfaatan dana kelurahan tersebut dibutuhkan partisipasi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang akan berkolaborasi dengan pihak kelurahan sebagai aparat pemerintah kota.

Kasub Bidang Pengendalian Program Daerah Bappeda Kota Yogyakarta, Zusri Kusuma Wardani SE

mengatakan, saat ini Tata Pemerintahan Pemkot Yogyakarta sedang menyusun revisi Peraturan Walikota (Perwal) tentang pelimpahan kewenangan. Perwal ini direvisi untuk mengakomodasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang dana kelurahan.

"Perwal ini diupayakan selesai akhir Maret 2019 karena menjadi syarat pencairan dana kelurahan," ujarnya dalam Diskusi Publik bertema 'Peran Masyarakat dalam Optimalisasi

Dana Kelurahan' di Aula Kantor Sekretariat DPD RI di DIY, Jalan Kusumanegara Yogyakarta, kemarin. Pembicara lain anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DIY Cholid Mahmud, Ketua LPMK H Haryanto SE ST, Rektor Universitas Nadhlatul Ulama (UNU) Yogyakarta Prof Purwo Santoso PhD mewakili kalangan akademisi. Diskusi juga dihadiri puluhan pengurus LPMK Kota Yogyakarta.

Zusri menilai penting adanya komunikasi antara LPMK dan kelurahan terkait pembagian peran dalam penggunaan dana kelurahan. Hasil dari komunikasi tersebut akan menjadi masukan dalam penyusun-

an Perwal.

"Diharapkan LPMK dan kelurahan selalu kolaboratif dan memahami permasalahan secara bersama, termasuk dalam hal dana kelurahan ini," ujarnya

Cholid Mahmud mengatakan, meskipun antara LPMK dan aparat kelurahan sebagai mitra sudah sering bekerja sama, namun terkait dana kelurahan ini, menjadi sesuatu yang baru. Diperlukan adanya saling pemahaman antara kedua belah pihak terutama mekanisme pembagian peran. "Saya rasa LPMK dan kelurahan perlu duduk bersama menyamakan persepsi terkait peran dalam pemanfaatan dana kelurahan ini," ujar Cholid. (Dev)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 13 Maret 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005